

## MEMBEDAH PENGATURAN HUKUM KEWARGANEGARAN CHILE: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN

**Deden Rafi Syafiq Rabbani**; Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Jalan Raya Jatinangor KM 21 Sumedang 45363 Jawa Barat; E-mail: dedenrafisyafiq@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini sejatinya mencoba untuk dapat memberikan pemahaman serta analisis terhadap dinamika hukum kewarganegaraan. Mengingat masih belum banyaknya literatur Indonesia berkaitan dengan hukum kewarganegaraan yang membahas terkait dengan pengaturan kewarganegaraan dari berbagai negara. Tulisan ini secara spesifik memberikan penjelasan terkait dengan pengaturan hukum kewarganegaraan Chile. Negara Chile dipilih karena memberikan rezim kewarganegaraan yang dapat dianalisis dalam lingkup hukum kewarganegaraan. Melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada kaidah hukum dalam hukum positif terhadap pengaturan kewarganegaraan Chile, maka diperoleh hasil bahwa: *Pertama*, perkembangan terhadap pengaturan kewarganegaraan Chile dapat dilihat berdasarkan rezim pengaturan hukum. *Kedua*, keterkaitan studi hukum kewarganegaraan terhadap perkembangan pengaturan kewarganegaraan Chile sangat dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek penting dalam hukum kewarganegaraan.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Hukum Kewarganegaraan, Chile.

### Abstract

*This paper is actually about trying to provide an understanding and analysis of the dynamics of citizenship law. Considering that there is still not much Indonesian literature related to citizenship law that discusses the regulation of citizenship from various countries. This paper specifically provides an explanation regarding the legal arrangement of Chile citizenship. Chile is selected because it provides a citizenship regime that can measure within the scope of citizenship law. Through a normative juridical approach based on the rule of law in positive law on Chile citizenship regulations, the results are that: First, developments in the regulation of Chile citizenship can be seen based on the legal regulatory regime. Second, the relevance of the study of citizenship law to the regulation of the development of Chile citizenship can be seen based on several important aspects of citizenship law.*

**Keywords:** Regulations, Citizenship law, Chile.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sejatinya konsepsi kewarganegaraan dapat dipahami sebagai wujud dari adanya pengaturan hukum yang dapat membentuk hubungan antara masyarakat dan negara. Konsep tersebut dapat ditemukan dan dilihat dari suatu rezim kewarganegaraan setiap negara *citizen regimes*.<sup>1</sup> Rezim tersebut bukan hanya memperlihatkan adanya hak serta tanggungjawab yang timbul dari kewarganegaraan, melainkan juga terhadap *social practice* setiap negara dalam memberikan pengaturan terkait dengan kewarganegaraan. Rezim kewarganegaraan di negara-negara Amerika Latin dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:<sup>2</sup> *Pertama*, terhadap karakter historis setiap negara yang memberikan pengaruh terhadap isi kewarganegaraan. *Kedua*, proses demokratisasi terhadap negara dalam rezim otoriter yang memberikan hubungan antara kewarganegaraan dengan

<sup>1</sup> Gerard van der Ree. (2011). "Citizenship from Above? The Case of Chile 1964-2010", *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, No. 90, h. 24.

<sup>2</sup> Evelina Dagnino. (2005). "Meaning Citizenship in Latin America". *IDS Working Paper*, No. 258, , h. 1-2.

*struggles democracy* sehingga berdampak terhadap segala hak yang muncul dari kewarganegaraan.

Disamping itu, konsep kewarganegaraan juga dipahami sebagai wujud dari adanya status hukum dan hubungan hukum antara negara dengan warga negara, bukan warga negara, serta orang asing. Sehingga, suatu negara dapat menentukan pembagian yang jelas terkait dengan hak serta kewajiban yang merupakan konsekuensi dari kewarganegaraan.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, konsep tersebut saling berhubungan atau koleratif. Artinya, status warga negara itu tidak hanya mengikat bagi pemegangnya melainkan juga kepada hak serta tanggung jawab terhadap suatu negara. Sehingga, berkaitan dengan rezim kewarganegaraan yang terdapat di Amerika Latin maka menghendaki setiap negara secara historis dapat mengembangkan konsep terhadap kewarganegaraan, bahkan dapat menetapkan mekanisme yang secara khusus dalam mengatur pemberian status warga negara serta segala hal yang berkaitan dengannya. Berkaitan dengan hal tersebut, negara Chile memiliki rezim kewarganegaraan yang bersifat khusus diantara negara-negara Amerika Latin lainnya. Terdapat dua kondisi agar dapat melihat rezim kewarganegaraan yang ada di negara Chile yaitu<sup>4</sup>: berdasarkan kondisi politik sejarah dan terhadap politik hukum pengaturan kewarganegaraan.

*Pertama*, Chile merupakan negara bekas jajahan Spanyol yang merdeka pada masa awal abad ke-19. Kondisi sejarah tersebut juga memberikan pengaruh terhadap konsepsi awal kewarganegaraan Chile yang didasarkan kepada Konstitusi Spanyol pada tahun 1812. Konstitusi tersebut kemudian memberikan pengaturan bahwa konsep dari *national* bangsa dan warga *citizen* itu memiliki perbedaan. Disamping itu, juga adanya proses naturalisasi warga negara Chile terhadap setiap individu yang lahir di negara tersebut didasarkan kepada persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi warga negara termasuk dalam memiliki hak politik. Oleh sebab itu, kondisi demikian menyebabkan Chile mempunyai kebijakan naturalisasi yang terbuka, termasuk menerapkan prinsip *Ius Soli* sebagai model awal dan dasar kewarganegaraannya. Selanjutnya melalui perkembangan politik Chile juga menerapkan prinsip *Ius Sanguinis* karena dampak dari kedatangan para imigran dari Eropa.

*Kedua*, politik hukum kewarganegaraan di negara Chile sepanjang sejarah selalu diatur dalam konstitusi negara, bahkan dengan undang-undang sebagai peraturan turunan dari konstitusi tersebut. Sehingga, faktor politik dalam kelembagaan maupun terhadap perkembangan pengaturan kewarganegaraan Chile akan memberikan pengaruh terhadap segala elemen penting dalam konteks kewarganegaraan. Saat ini, pengaturan kewarganegaraan Chile diatur dalam Konstitusi Negara Chile 1980 pada bagian *Nationality and Citizenship* juga terhadap konstitusi negara Chile yang diubah secara substansial pada tahun 2005. Di samping itu, termasuk beberapa amandemen pada tahun 2012 dan 2015. Selain itu, pengaturan awal kewarganegaraan Chile juga diatur dalam

---

<sup>3</sup> R. Brubaker. (1992). *Citizenship and Nationality in France and Germany*, Cambridge: Harvard University Press, h. 46.

<sup>4</sup> Evelina Dagnino. (2003). "Citizenship in Latin America", *Latin American Perspectives*, Issue 129, Vol. 30, No. 2, h. 218.

sebuah undang-undang, yaitu *decree number* 175/1973 tentang naturalisasi kewarganegaraan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka fokus penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana perkembangan pengaturan kewarganegaraan pada negara Chile. *Kedua*, bagaimana keterkaitan studi hukum kewarganegaraan terhadap perkembangan pengaturan kewarganegaraan Chile.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada kaidah hukum dalam hukum positif.<sup>5</sup> Oleh Sebab itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan *library research* dengan mengedepankan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Lalu Lintas Pengaturan Kewarganegaraan di Negara Chile**

Untuk dapat mengetahui pengaturan kewarganegaraan pada negara Chile maka dapat didasarkan kepada pola perkembangan kewarganegaraan yang terjadi di negara tersebut yang dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, terhadap latar belakang sejarah. *Kedua*, rezim kewarganegaraan Chile saat ini. Dalam konteks latar belakang sejarah kewarganegaraan di negara Chile. Jika kita lihat dalam Konstitusi pertama negara Chile pada tahun 1812 dalam Artikel 24 dibedakan terkait dengan penduduk asli negara Chile dan orang asing dari Spanyol.<sup>6</sup> Hal tersebut merupakan pengaruh masa kolonisasi Chile oleh Spanyol. Hingga pada rentang tahun 1812 sampai 1833 merupakan rentang perubahan konstitusi negara Chile. Selanjutnya terdapat piagam kewarganegaraan *citizenship charter* yang memberikan ketentuan bahwa pemberian kewarganegaraan Chile berdasarkan tradisi yang ada di Amerika Latin yaitu mengikuti prinsip *Ius Soli* atau berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Namun, berdasarkan konstitusi negara Chile pada tahun 1822 dalam Artikel 4 dinyatakan bahwa<sup>7</sup>: "*the children of Chileans, although born outside the State will be Chileans*". Artinya, bahwa setiap anak-anak Chile yang lahir diluar negara maka akan tetap menjadi orang Chile.

Selanjutnya berdasarkan Konstitusi negara Chile yang diubah pada tahun 1823 bahwa konstitusi ini memberikan penegasan rezim kewarganegaraan Chile yang didasarkan kepada prinsip *Ius Soli* dengan menggunakan juga prinsip *Ius Sanguinis*

---

<sup>5</sup> J. Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 25.

<sup>6</sup> Lucy Taylor. (1998). *Citizenship, Participation, and Democracy: Changing Dynamics in Chile and Argentina*, London: Macmillan Press LTD, h. 61.

<sup>7</sup> Lihat Konstitusi Negara Chile Tahun 1822 Artikel 4 (Constitucion Politica del Estado de Chile 1822, Art. 4).

secara terbatas, serta memberikan kebijakan naturalisasi melalui kewenangan legislatif dalam memberikan kewarganegaraan secara individu. Ketentuan ini kemudian dipertahankan melalui perubahan konstitusi Chile pada tahun 1833 dan berlaku sampai dengan tahun 1925. Rezim kewarganegaraan Chile kemudian diatur dalam Artikel 6 dan 7 Konstitusi tahun 1833 yang kemudian menggabungkan prinsip *Ius Soli* serta bentuk terbatas prinsip *Ius Sanguinis*. Sehingga memberikan pengaturan bahwa selain terhadap individu yang lahir di negara Chile maka kewarganegaraan Chile dapat diberikan kepada:<sup>8</sup> (1) Anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Chile dan lahir di luar negeri, setelah menetap di negara Chile. (2) Orang asing yang bekerja atau bahkan memiliki properti dan telah tinggal atau menetap selama sepuluh tahun di negara Chile. (3) Meraka yang telah melakukan proses naturalisasi.

Selanjutnya pada tahun 1925 di bawah kepemimpinan Arturo Alessandri Palma konstitusi Chile yang baru kemudian disetujui dan berlaku sampai dengan tahun 1980. Konstitusi tersebut kemudian memberikan pengaturan baru terhadap rezim kewarganegaraan Chile yang menetapkan terkait dengan proses kehilangan status kewarganegaraan Chile yang dapat didasarkan kepada tiga alasan yaitu: (1) karena proses naturalisasi di negara lain, (2) pembatalan proses naturalisasi oleh negara Chile melalui pembatalan *naturalisation certificate*, (3) memberikan bantuan kepada negara musuh.<sup>9</sup> Hingga pada tahun 1957 amandemen konstitusi juga memberikan batasan terhadap penolakan status kewarganegaraan Chile yang dinaturalisasi di negara lain. *Pertama*, bahwa terhadap penolakan kewarganegaraan Spanyol akan diberikan kepada mereka yang lahir di negara Spanyol, dengan syarat tinggal lebih dari 10 tahun di negara Chile dengan mempertimbangkan manfaat yang sama yang diberikan kepada warga negara Chile di negara tersebut. Namun, pada tahun 1958 ketentuan tersebut dihilangkan sehingga dalam hal ini terhadap warga negara Spanyol tidak memiliki hak untuk melepaskan kewarganegaraan asli mereka ketika menjadi orang Chile dan warga negara Chile tidak harus melepaskan kewarganegaraannya saat menjadi orang Spanyol.<sup>10</sup> *Kedua*, bahwa hilangnya kewarganegaraan Chile tidak berlaku jika didasarkan atas hukum dan konstitusi negara lain, warga Chile diharuskan untuk dapat melakukan proses adopsi kewarganegaraan sebagai syarat untuk bertempat tinggal secara permanen di negara lain.<sup>11</sup> Adapun pada tahun 1973 pemerintah negara Chile mengalami kudeta dibawah pimpinan Jenderal Augusto Pinochet, kondisi tersebut mempengaruhi rezim kewarganegaraan di negara Chile. Salah satunya memaksakan prosedur melalui keputusan pemerintah Nomor 175/1973 yang memberikan pengaturan bahwa kewarganegaraan Chile dapat hilang terhadap seseorang apabila secara serius melakukan tindakan yang merugikan kepentingan vital negara.

<sup>8</sup> Lihat Konstitusi Negara Chile Tahun 1833 Artikel 6 dan 7 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1833, Art. 6 and Art. 7).

<sup>9</sup> Gabriel Echeverria. (2016). "Report on Citizenship Law: Chile", *EUDO Citizenship Observatory*, Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School, h. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sampai pada tahun 1980 konstitusi baru negara Chile kemudian disahkan. Terdapat dua hal penting dalam konstitusi tersebut yaitu<sup>12</sup>: *Pertama*, perluasan perlindungan kewarganegaraan Chile terhadap proses naturalisasi diperlukan semata-mata untuk memiliki status hukum *legal status* sebagai jalan dalam menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. *Kedua*, dalam hal kehilangan status kewarganegaraan Chile juga didasarkan kepada proses yudisial terhadap kejahatan yang dilakukan warga negara Chile serta memberikan dampak terhadap martabat negara dan kepentingan fundamental negara. Maka, pencabutan kewarganegaraan tersebut harus melalui proses yudisial serta dengan keputusan kongres. Hingga akhirnya konstitusi Chile tahun 1980 secara substansial diubah berdasarkan reformasi dibawah Presiden Ricardo Lagos pada tahun 2005. Perubahan tersebut juga memberikan pengaruh terhadap konsep kewarganegaraan Chile yaitu melakukan kombinasi antara prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*.

Kemudian, terhadap rezim kewarganegaraan Chile saat ini yang diatur berdasarkan Konstitusi Chile tahun 1980 serta beberapa amandemen atau perubahannya. Rezim kewarganegaraan Chile dapat di lihat berdasarkan empat bagian antara lain: (1) terhadap penerimaan dan pemberian kewarganegaraan, (2) kehilangan serta pencabutan kewarganegaraan, (3) aturan khusus untuk kelompok tertentu, dan (4) pengaturan lembaga khusus rezim kewarganegaraan Chile.

*Pertama*, terhadap penerimaan atau pemberian kewarganegaraan. Pada prinsipnya konstitusi negara Chile menetapkan beberapa jalan untuk memperoleh kewarganegaraan Chile, yaitu berdasarkan prinsip *Ius Soli*, *Ius Sanguinis*, naturalisasi, dan pemberian naturalisasi. Jika kita lihat berdasarkan Artikel 10 bagian 1 Konstitusi Chile tahun 1980 menyatakan bahwa<sup>13</sup> :

*"Chileans are:*

- 1) *Those born in the territory of Chile, with the exception of those children of foreigners who are in Chile in the service of their Government and the children of transient foreigners, all of whom, however, may opt for the Chilean nationality;"*

Ketentuan di atas sejatinya merupakan cerminan digunakannya asas *Ius Soli*. Karena dalam ketentuan tersebut bahwa setiap mereka yang lahir di negara Chile serta dikecualikan terhadap anak-anak dari orang asing yaitu diplomat yang berada di Chile serta memberikan manfaat terhadap pemerintahan, termasuk juga yang bersifat sementara dapat juga memilih kewarganegaraan Chile. Disamping itu, ketentuan tersebut juga harus memperhatikan ketetapan dari Supreme Court Chile Nomor 5142 yang menyatakan bahwa terkait dengan nasionalisasi orang asing, dinyatakan bahwa:

*"Further specifies in Art. 10: "Those born in the Chilean territory who are the children of foreigners who are in Chile in the service of their Government, and of transient foreigners, that decide to opt for the Chilean citizenship, [...], will do it through a statement in which*

---

<sup>12</sup> Lihat Konstitusi Negara Chile Tahun 1980 Artikel 11 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980, Art. 11).

<sup>13</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 10 bagian 1 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 10).

*they manifest their request. Such statement should be made within the mandatory term of one year since their eighteenth birthday”.*

Sehingga terhadap mereka anak dari orang asing yang lahir di negara Chile adalah warga negara Chile dan untuk memutuskan memilih kewarganegaraan Chile dilakukan melalui sebuah pernyataan saat usia 18 tahun. Selanjutnya dalam Artikel 10 bagian 2 juga dijelaskan bahwa<sup>14</sup> :

*“2) The children of a Chilean father or mother, born in foreign territory. However, it will be required that one of his ancestors in a direct line of first or second degree, has acquired Chilean nationality by virtue of reasons established in sections 1, 3 or 4;”*

Sehingga terhadap mereka anak dari ayah atau ibu kewarganegaraan Chile yang lahir di wilayah negara asing, maka diperlukan berdasarkan keturunan secara langsung telah memperoleh kewarganegaraan Chile. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan oleh reformasi konstitusi Chile pada tahun 2005 yang kemudian memberikan pengaturan bahwa terhadap prinsip *Ius Sangunis* yaitu dalam hal memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari ayah atau ibu, hanya ditetapkan terhadap anak-anak Chile yang lahir dan tinggal di luar negeri. Sehingga penekanan dalam prinsip *Ius Sanguinis* oleh negara Chile juga dilaksanakan kepada anak maupun cucu yang lahir dari seorang warga negara Chile yang telah memperoleh sertifikat naturalisasi, maka secara langsung memperoleh kewarganegaraan Chile. Selanjutnya dalam Artikel 10 bagian 3 juga dinyatakan bahwa<sup>15</sup>:

*“3) The foreigners who obtain a certificate of nationalisation in accordance with the law;”*

Ketentuan di atas mengatur terkait dengan proses nasionalisasi atau naturalisasi terhadap orang asing yang bertempat tinggal di negara Chile. Adapun syarat proses nasionalisasi terhadap orang asing tersebut didasarkan kepada ketetapan *Supreme Court Chile* Nomor 5142, bahwa syarat tersebut meliputi: (1) berusia minimal 18 tahun, (2) telah lima tahun tinggal di negara Chile dengan resmi, (3) mempunyai izin tinggal secara permanen. Setelah syarat tersebut terpenuhi maka mereka akan memperoleh sertifikat naturalisasi oleh negara Chile. Kemudian dalam Artikel 10 bagian 4 menyatakan bahwa<sup>16</sup>:

*“4) Those who have obtained a special grant of naturalisation by law”.*

Ketentuan ini mengatur terkait dengan proses penerimaan dan pemberian kewarganegaraan Chile yang bersifat *discretionary* atau diskresi. Karena ketentuan terkait dengan pemberian naturalisasi atau hibah terhadap proses tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan dari *Nationality and Citizenship Commission of the House of Representatives Chile* melalui prosedur hukum yang mengatur terkait dengan pemberian, penolakan, dan pembatalan proses naturalisasi tersebut.

---

<sup>14</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 10 bagian 2 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 10).

<sup>15</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 10 bagian 3 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 10).

<sup>16</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 10 bagian 4 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 10).

*Kedua*, terhadap kehilangan dan pencabutan kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan dalam Artikel 11 Konstitusi Chile mengatur empat model kehilangan kewarganegaraan Chile dinyatakan sebagai berikut<sup>17</sup>:

*“Chilean nationality is lost:*

- 1. By voluntary resignation manifested before the competent Chilean authorities. This resignation will only take effect of the person, previously has been nationalized in a foreign country.*
- 2. By a supreme decree, in case of having provided services, during a foreign war, to enemies of Chile or their allies.*
- 3. By cancellation of the letter of naturalization, and*
- 4. By a law that reverses the naturalization grant.*

*Those who have lost the Chilean nationality for any of the reasons set out in this article, may only be rehabilitated by law.”*

Ketentuan bagian pertama memberikan pemahaman bahwa hilangnya kewarganegaraan Chile didasarkan kepada tindakan pengunduran diri secara sukarela dihadapan otoritas publik Chile. Ketentuan tersebut juga memiliki syarat bahwa untuk dapat melakukan pelepasan kewarganegaraan Chile maka terhadap orang tersebut harus telah dinaturalisasi di negara lain. Selanjutnya, pada bagian kedua bahwa hilangnya kewarganegaraan Chile didasarkan kepada keputusan pengadilan kepada setiap warga negara Chile yang memberikan bantuan kepada musuh negara dalam konteks perang secara internasional. Penyediaan bantuan tersebut dapat termasuk dalam wujud militer yaitu tergabung dalam tentara asing serta tindakan yang bersifat propagandistik.

Selanjutnya dalam bagian ketiga bahwa hilangnya kewarganegaraan Chile dapat dilakukan melalui pembatalan sertifikat naturalisasi melalui keputusan tertinggi dari Supreme Court yaitu *“Decreto Supremo”*. Pembatalan tersebut dilaksanakan dengan alasan adanya pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan negara. Dalam Artikel 11 Konstitusi Chile 1980 juga ditentukan terkait dengan mereka yang kehilangan status kewarganegaraan Chile yang dapat dilakukan berdasarkan hukum. Sehingga cara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Chile adalah melalui prosedur hukum yaitu undang-undang atau ketetapan. Dalam Artikel 12 juga mensyaratkan dasar adanya prosedur bagaimana seseorang dapat mengajukan banding terhadap tindakan administratif yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan Chile. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap penerapan dalam Artikel 11.

*Ketiga*, aturan khusus bagi kelompok tertentu. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa kepada mereka yang memperoleh kewarganegaraan Chile berdasarkan: (1) *Ius Soli* Artikel 10 bagian 1, (2) *Ius Sanguinis* Artikel 10 bagian 2, dan (3) pemberian naturalisasi Artikel 10 bagian 4 Konstitusi Chile, maka secara otomatis memperoleh hak politik dengan batas awal usia 18 tahun, serta terhadap proses naturalisasi menunggu selama 5 tahun saat sertifikat naturalisasi diberikan.<sup>18</sup> Kemudian, Artikel 25 Konstitusi Chile 1980 terkait dengan pencalonan presiden negara Chile mengecualikan warga

<sup>17</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 11 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 11).

<sup>18</sup> Gabriel Echeverria, *Op.Cit*, h. 14.

negara yang dinaturalisasi bahkan warga negara yang diberikan naturalisasi sebagaimana ketentuan dalam Artikel 10 bagian 3 dan 4 Konstitusi Chile. *Keempat*, terkait dengan pengaturan lembaga khusus. Terhadap penolakan kewarganegaraan Chile juga diberikan kewenangannya kepada Kongres Nasional termasuk dapat didelegasikan kepada kekuasaan Presiden.

## B. Konteks Hukum Kewarganegaraan dalam Pengaturan Kewarganegaraan di Negara Chile

Berkaitan dengan hukum kewarganegaraan maka terdapat beberapa elemen penting, antara lain: (1) konsep dasar kewarganegaraan, (2) ruang lingkup kewarganegaraan, dan (3) asas serta prinsip penting dalam kewarganegaraan. Elemen tersebut akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab pembahasan ini. *Pertama*, terkait dengan konsep dasar kewarganegaraan. Konsep dasar kewarganegaraan pada prinsipnya adalah suatu hubungan yang bersifat terperinci atau spesifik diantara individu dan negara.<sup>19</sup> Hubungan tersebut sejatinya memuat terkait dengan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, serta dapat menjadi daya pembeda dengan individu yang tidak memiliki status sebagai warga negara. Kondisi tersebut yang dapat dikatakan sebagai *full member* terhadap sebuah komunitas politik tertentu.<sup>20</sup> Sehingga, konsep kewarganegaraan itu merupakan wujud dari keterlibatan penuh sebuah komunitas politik yang bersifat nasional. Disamping itu, jika kita tinjau dalam sudut pandang hak asasi manusia kewarganegaraan dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan pemenuhan terhadap hak-hak asasi yang lain atau sebagai *the right to have right*.<sup>21</sup>

Selanjutnya, menurut Makarov menjelaskan bahwa berkaitan dengan konsep kewarganegaraan, maka terdapat dua sudut pandang yang menjelaskan karakter dari hukum kewarganegaraan yaitu: (1) kewarganegaraan sebagai hubungan hukum *legal relationship* dan (2) kewarganegaraan sebagai status hukum *legal status*.<sup>22</sup> Sebagai hubungan hukum, kewarganegaraan sejatinya dapat dipahami sebagai sebuah hubungan yang timbul antara negara dan warganya dan mencakup segala hak-hak dan juga beberapa kewajiban. Sedangkan sebagai status hukum kewarganegaraan merupakan wujud dari adanya hak serta kewajiban tersebut yang merupakan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan bagi pemegangnya. Sehingga dalam hal ini kewarganegaraan juga merupakan bentuk dari adanya identitas dan perasaan yang bersifat kolektif.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, dalam hal ini konsepsi kewarganegaraan dapat dipandang sebagai: (1) hubungan dan status hukum, (2) suatu hak, dan (3) aktifitas politik.

Kemudian jika melihat kondisi negara Chile bahwa dalam konsep kewarganegaraan Chile menurut Benjamin Barber dalam Lucy Taylor bahwa model yang digunakan oleh

<sup>19</sup> P. Weis. (1979). *Nationality and Statelessness in International Law*, The Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publisher, h. 29.

<sup>20</sup> Vogel, Ursula. (1991). "Is Citizenship Gender-Specific?", dalam Vogel, Ursula, dan Moran, Michael (eds), *The Frontiers Citizenship*, London: MacMillan, h. 62.

<sup>21</sup> Stephanie Degoyer (et.al), (2018). *The Right to Have Rights*, London: Verso, h. 114.

<sup>22</sup> P. Weis, *Op.Cit*, h. 29-30.

<sup>23</sup> Linda Bosniak. (2000). "Citizenship Denationalized (The State of Citizenship Symposium)", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 2, h. 455.



negara Chile adalah *participatory model*. Model ini mendasarkan bahwa kewarganegaraan itu sangat berkaitan erat dengan pergerakan yang menekankan terhadap partisipasi secara aktif dalam lingkup pembentukan sebuah pengaturan hukum dalam bidang kewarganegaraan.<sup>24</sup> Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keikutsertaan dalam tubuh pemerintahan suatu negara dalam memberikan pengaturan terhadap kewarganegaraan karena menjadi elemen yang fundamental. Melainkan juga termasuk dalam menghilangkan kediktatoran suatu rezim pemerintahan.<sup>25</sup> Melihat perjalanan yang begitu panjang dilalui oleh negara Chile dalam membentuk serta menerapkan pengaturan kewarganegaraannya. Mulai dari jaman masa kolonisasi oleh negara Spanyol, hingga pada masa kediktatoran dibawah rezim Jenderal Augusto Pinochet yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pengaturan kewarganegaraan di negara Chile. Selain itu, melihat jangka waktu yang begitu panjang dari tahun 1822-1980 merupakan waktu dimana konstitusi negara Chile mengalami beberapa perubahan serta dikeluarkan berbagai peraturan yaitu undang-undang termasuk ketetapan Supreme Court Chile yang memberikan ragam pengaturan terkait dengan persoalan kewarganegaraan. Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa adanya partisipasi politik dari pemerintah yang didasarkan kepada perkembangan dalam menanggapi serta merespon segala permasalahan terkait dengan kewarganegaraan yang terjadi.

Sehingga, melihat kondisi demikian maka terhadap segala bentuk perkembangan tersebut memberikan dampak terhadap pengaturan kewarganegaraan Chile baik berupa penambahan, penghapusan, maupun penyempurnaan terhadap hukum kewarganegaraan Chile. Dengan demikian, pada dasarnya perkembangan tersebut mencerminkan jantung dari pengaturan hukum kewarganegaraan yang terkait dengan hubungan serta status hukum antara negara dan warganya dan sebagai aktifitas politik yang terjadi berdasarkan kondisi sejarah negara Chile dalam memberikan pengaturan hukum kewarganegaraannya.

Selain itu, terhadap ide mengenai loyalitas (kesetiaan) atau komitmen juga menjadi karakter inti dari kewarganegaraan yang sudah ada sejak lama dan terus berlangsung. Ide atau gagasan tersebut dapat dijumpai dalam sejarah hukum, *common law system*, undang-undang, putusan hakim, teori-teori hukum, dan teori-teori politik termasuk dalam konteks lain.<sup>26</sup> Pandangan mengenai hubungan antara warga negara dan negara itu juga selalu ditandai dengan ide loyalitas tersebut. Loyalitas ini merupakan suatu tema yang sentral dalam skema hukum terhadap pencabutan kewarganegaraan. Dalam hal ini konsep tersebut dapat mengidentifikasi kesetiaan itu sebagai suatu hal yang sangat fundamental dalam kewarganegaraan dan seringkali dijadikan sebagai dasar untuk mencabut status kewarganegaraan seseorang.

*Kedua*, dalam hal ruang lingkup kewarganegaraan. Pada dasarnya terdapat dua teori yang dapat menentukan ruang lingkup terkait dengan kewarganegaraan antara

---

<sup>24</sup> Lucy Taylor, *Op.Cit*, h. 21.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>26</sup> Helen Irving. (2019). "The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study, *Legal Studies Research Paper Series*, No. 19/35, h. 1-2.

lain<sup>27</sup>: *Pertama*, teori normatif. Teori ini digunakan untuk menetapkan segala hak dan kewajiban warga negara yang dimilikinya. *Kedua*, teori empiris. Teori ini digunakan untuk menjalankan hak dan kewajiban warga negara yang diperoleh berdasarkan pemberian kewarganegaraan. Dalam teori normatif melihat kepada lalu lintas sejarah pengaturan kewarganegaraan yang dapat membentuk karakter kewarganegaraan sebuah negara. Sedangkan dalam teori empiris melihat terhadap proses politik terbentuknya kewarganegaraan suatu negara, serta melihat bagaimana suatu negara dapat menentukan bentuk atau sifat kewarganegaraannya yang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam konteks ruang lingkup kewarganegaraan juga berkaitan dengan batasan suatu negara melalui lembaga institusional dalam memberikan perwujudan terhadap pengaturan kewarganegaraan negara tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka pada prinsipnya secara umum ruang lingkup kewarganegaraan itu dapat meliputi hal-hal penting sebagai berikut: (1) menentukan batas terhadap siapa yang menjadi warga negara dalam suatu negara, (2) menetapkan tata cara memperoleh kewarganegaraan suatu negara, (3) menetapkan tata cara kehilangan kewarganegaraan seseorang, dan (4) menetapkan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan. Oleh sebab itu, melihat terhadap evolusi pengaturan kewarganegaraan Chile yang berjalan cukup lama, pada hakikatnya menunjukkan perkembangan pengaturan kewarganegaraan baik secara normatif dan empiris, agar dapat membentuk sebuah pengaturan yang menetapkan prosedur dalam memperoleh status kewarganegaraan, proses kehilangan kewarganegaraan, hingga proses dalam memperoleh kembali status kewarganegaraan.

*Ketiga*, terhadap asas serta prinsip penting dalam kewarganegaraan. Dalam konteks hukum kewarganegaraan pada hakikatnya terhadap asas maupun prinsip dalam status kewarganegaraan dilaksanakan berdasarkan asas *Ius Soli* "the law of the land" dan *Ius Sanguinis* "the law of the blood". Pada hakikatnya asas *Ius Soli* menghendaki bahwa penentuan status kewarganegaraan itu didasarkan secara penuh kepada kelahiran yang didasarkan pada tempat atau wilayah teritorial yurisdiksi suatu negara. Sedangkan asas *Ius Sanguinis* memberikan penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan kepada hubungan darah dan garis keturunan dari orang tua.<sup>29</sup> Kedua asas tersebut pada dasarnya lahir karena konsekuensi terhadap hak sebagai elemen penting dari kewarganegaraan, termasuk dalam menentukan status hukum seseorang. Dalam hal ini, kewarganegaraan dipahami sebagai konsep hukum yang memberikan nasionalitas serta hak-hak yang muncul darinya, dan hak tersebut dapat diberikan dan digunakan sesuai

<sup>27</sup> Richard Bellamy. (2008). *Citizenship A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, h. 27-28.

<sup>28</sup> Francoise Montambeault (et.al). (2020). "Widening and Deepening Citizenship From the left?", dalam Manuel Balan dan Francoise Montambeault, *Legacies Of The Left Turn In Latin America: The Promise of Inclusive Citizenship*, USA: University of Notre Dame Press, h. 17-18.

<sup>29</sup> Myres S. McDougal, Harold D. Laswell, Lung-chu Chen. (1974). "Nationality and Human Rights: The Protection of the Individual in External Arenas". *The Yale Law Journal*, Vol. 83, h. 904.

dengan berbagai persyaratan agar dapat menjadi komunitas dalam nasionalitas negara tertentu.<sup>30</sup>

Terhadap asas *Ius Soli* misalnya karena basis asas tersebut adalah terhadap konsep wilayah atau teritorial maka terhadap seseorang yang lahir di suatu negara tertentu maka secara alamiah merupakan bagian dari negara tersebut. Sehingga berdasarkan asas ini maka secara langsung menjadi warga negara di negara tersebut. Berbeda dengan asas *Ius Sanguinis* bahwa sifat alamiah seseorang untuk menjadi bagian dari suatu negara bukan berarti merupakan bagian dari bangsa atau negara tersebut. Sehingga, harus memperhatikan penentuan status kewarganegaraan berdasarkan kepada garis keturunan atau darah dari orang tua, asas ini kemudian menjadi penting dan diterapkan di berbagai negara. Oleh sebab itu, konsep kewarganegaraan merupakan konsep yang spesifik, termasuk dalam penentuan status warga negara terhadap seseorang karena didalamnya memberikan pengaturan terhadap pemberian hak-hak sipil dan politik sebagai *state membership*.<sup>31</sup>

Selain asas dalam penentuan status kewarganegaraan di atas, terhadap prinsip dalam memperoleh kewarganegaraan serta proses kehilangan kewarganegaraan juga menjadi penting. Dalam proses memperoleh kewarganegaraan biasanya disebut dengan naturalisasi, sedangkan proses kehilangan kewarganegaraan biasanya disebut dengan denasionalisasi. *Pertama*, terhadap proses naturalisasi. Proses naturalisasi merupakan proses pemberian kewarganegaraan yang diberikan biasanya karena kelahiran di wilayah suatu negara bahkan terhadap seseorang yang sudah secara permanen menetap pada wilayah suatu negara.<sup>32</sup> Proses tersebut tidak semata-mata diberikan kepada orang asing yang berada pada suatu negara, melainkan terdapat syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara dalam melakukan proses naturalisasi. Hal tersebut merupakan cerminan konsep kewarganegaraan sebagai *broadly political notion* yaitu sebagai alat masyarakat dan negara dalam menegaskan konsep kedaulatannya termasuk dalam melakukan proses naturalisasi.<sup>33</sup> *Kedua*, dalam proses denasionalisasi. Proses kehilangan status kewarganegaraan ini pada hakikatnya diterapkan karena terdapat suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang megancam kepentingan nasional negara, bahkan termasuk kepada pelanggaran-pelanggaran hukum yang ditentukan oleh suatu undang-undang. Sehingga, proses denasionalisasi dapat diterapkan sebagai denasionalisasi kolektif yaitu berlaku berdasarkan hukum yang mengatur dan denasionalisasi individu yaitu berdasarkan keputusan otoritas yang berwenang atau pengadilan dalam memberikan keputusan terhadap individu dalam kasus tertentu yang dapat

---

<sup>30</sup> Alastair Davidson dan Kathleen Weekley. (1999). *Globalization And Citizenship In The Asia-Pacific*, New York: ST. Martin's Press, h. 3-4.

<sup>31</sup> Kim Rubenstein. (2000). "International Citizenship: the Future of Nationality in a Globalized World, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 2, h. 522-523.

<sup>32</sup> Linda Bosniak. (2006). *The Citizen and The Alien: Dilemmas of Contemporary Membership*, United Kingdom: Princeton University Press, h. 32.

<sup>33</sup> Alastair Davidson dan Kathleen Weekley, *Loc.Cit.*

menyebabkan kehilangan status kewarganegaraannya.<sup>34</sup> Proses denasionalisasi secara umum dapat diterapkan terhadap masalah ketidaksetiaan warga negara terhadap negara seperti<sup>35</sup> : (1) emigrasi ilegal, (2) melakukan pengkhianatan dan kegiatan yang merugikan kepentingan negara, dan (3) penolakan untuk kembali berdasarkan keputusan pihak berwenang.

Selanjutnya, berdasarkan asas dan prinsip penting di atas, terhadap kondisi penentuan status kewarganegaraan serta proses naturalisasi dan denasionalisasi dapat menjadi rumit ketika menghadapi kondisi *transnational citizenship* yaitu saat seseorang memiliki keterikatan lebih dari satu terhadap negara lain.<sup>36</sup> Kondisi tersebut tidak terlepas sebagai akibat dari emigrasi dan globalisasi yang bersifat reaktif. Sehingga, pengaturan kewarganegaraan suatu negara kemudian didasarkan kepada setiap pilihan hukum suatu negara yang ditentukan atas kebutuhan hukum dalam merespon permasalahan kewarganegaraan yang terjadi. Melihat kontekstualisasi negara Chile yang menentukan bahwa terhadap proses pemberian kewarganegaraan dapat didasarkan kepada (1) asas *Ius Soli*, otomatis terhadap semua anak di wilayah negara Chile kecuali anak diplomat atau anak orang asing sementara dapat memilih kewarganegaraan Chile setelah berusia 18 tahun, (2) asas *Ius Sanguinis*, otomatis terhadap anak atau cucu dari orang tua negara Chile yang lahir di luar negeri yang belum memperoleh kewarganegaraan, (3) pemberian naturalisasi biasa, dan (4) hibah naturalisasi berdasarkan keputusan kongres. Sedangkan terhadap hilangnya kewarganegaraan Chile dapat disebabkan karena: (1) penolakan sukarela atas kewarganegaraan ganda, (2) berdasarkan keputusan tertinggi kepada warga negara yang memberikan bantuan kepada negara musuh selama dalam perang internasional, (3) pembatalan naturalisasi melalui sertifikat, dan (4) pembatalan proses hibah naturalisasi. Beberapa proses diatas menunjukan bahwa terhadap proses pemberian maupun kehilangan status kewarganegaraan merupakan wujud adanya pengaturan naturalisasi serta denasionalisasi dalam hukum kewarganegaraan suatu negara yang didasarkan kepada pilihan-pilihan hukum yang ditentukan oleh setiap negara.

## PENUTUP

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka diperoleh suatu kesimpulan antara lain: *Pertama*, perkembangan terhadap pengaturan kewarganegaraan Chile itu berevolusi secara bertahap yang dilihat berdasarkan perkembangan konstitusi negara Chile maupun faktor politik lainnya. Melalui transformasi dalam konstitusi negara Chile yang memberikan ruang terhadap lalu lintas sejarah negara Chile dalam membentuk pengaturan hukum kewarganegaraan bagi negaranya. *Kedua*, keterkaitan studi hukum kewarganegaraan terhadap perkembangan pengaturan kewarganegaraan Chile sangat

---

<sup>34</sup> Manley O. Hudson. (1952). "Nationality Including Statelessness", *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. 2, h. 18.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Peter J. Spiro. (2010). "Dual Citizenship as Human Rights", *International Journal of Constitutional Law (I-CON)*, Vol. 8, No. 1, h. 111.

dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek, mulai dari transformasi penggunaan asas *Ius Soli* murni kemudian menjadi campuran dengan asas *Ius Sanguinis* yang menunjukkan adanya kebutuhan hukum suatu negara. Juga termasuk konsep dasar serta proses penentuan, pemberian, maupun penghilangan kewarganegaraan yang secara prinsip oleh negara Chile diimplementasikan melalui konstitusi negara tersebut ataupun oleh prosedur hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alastair Davidson dan Kathleen Weekley. (1999). *Globalization And Citizenship In The Asia-Pacific*, New York: ST. Martin's Press.
- J. Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Linda Bosniak. (2006). *The Citizen and The Alien: Dilemas of Contemporary Membership*, United Kingdom: Princeton University Press.
- Lucy Taylor. (1998). *Citizenship, Participation, and Democracy: Changing Dynamics in Chile and Argentina*, London: Macmillan Press LTD.
- Manuel Balan dan Francoise Montambeault. (2020). *Legacies Of The Left Turn In Latin America: The Promise of Inclusive Citizenship*, USA: University of Notre Dame Press.
- P. Weis. (1979). *Nationality and Statelessness in International Law*, The Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publisher.
- R. Brubaker. (1992). *Citizenship and Nationality in France and Germany*, Cambridge: Harvard University Press.
- Richard Bellamy. (2008). *Citizenship A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Stepahnie Degoyer (et.al). (2018). *The Right to Have Rights*, London: Verso,
- Vogel, Ursula. (1991). "Is Citizenship Gender-Specific?", dalam Vogel, Ursula, dan Moran, Michael (eds), *The Frontries Citizenship*, London: MacMillan,

### Artikel Jurnal

- Evelina Dagnino. (2003). "Citizenship in Latin America", *Latin American Perspectives*, Issue 129, Vol. 30, No. 2.
- \_\_\_\_\_. (2005). "Meaning Citizenship in Latin America", *IDS Working Paper*, No. 258.
- Gerard van der Ree. (2011). "Citizenship from Above? The Case of Chile 1964-2010", *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, No. 90.
- Helen Irving. (2019). "The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study", *Legal Studies Research Paper Series*, No. 19/35.
- Kim Rubenstein. (2000). "International Citizenship: the Future of Nationality in a Globalized World", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 2.
- Linda Bosniak. (2000). "Citizenship Denationalized (The State of Citizenship Symposium)", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 2.

- Manley O. Hudson. (1952). "Nationality Including Statelessness", *Yearbook of the Internastional Law Comission*, Vol. 2.
- Myres S. McDougal, Harold D. Laswell, Lung-chu Chen. (1974). "Nationality and Human Rights: The Protection of the Individual in External Arenas", *The Yale Law Journal*, Vol. 83.
- Peter J. Spiro. (2010). "Dual Citizenship as Human Rights", *International Journal of Constitutional Law (I-CON)*, Vol. 8, No. 1.

#### **Hasil Penelitian**

Gabriel Echeverria. (2016). "Report on Citizenship Law: Chile", *EUDO Citizenship Observatory*, Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School.

#### **Dokumen Hukum**

Konstitusi Negara Chile Tahun 1822 (Constitucion Politica del Estado de Chile 1822)  
Konstitusi Negara Chile Tahun 1833 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1833)  
Konstitusi Negara Chile Tahun 1980 dan beberapa perubahannya (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications)